

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah. Dalam Pelaksanaan dan Implementasi program dan kegiatan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan dan Surat Perintah Tugas Nomor 800/679/BKD-2016 tanggal 31 Oktober 2016.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan program dan kegiatannya guna memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tertib, efektif, transparan, akuntabel berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan melalui Rencana Strategis (Renstra) maka pelaksanaannya harus dilakukan dengan perencanaan secara sistematis dan berkesinambungan (tahunan) yang diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2017.
3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam rencana kinerja tahunan sebagai wujud dari kinerja organisasi perangkat daerah pada tahun 2017, ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).

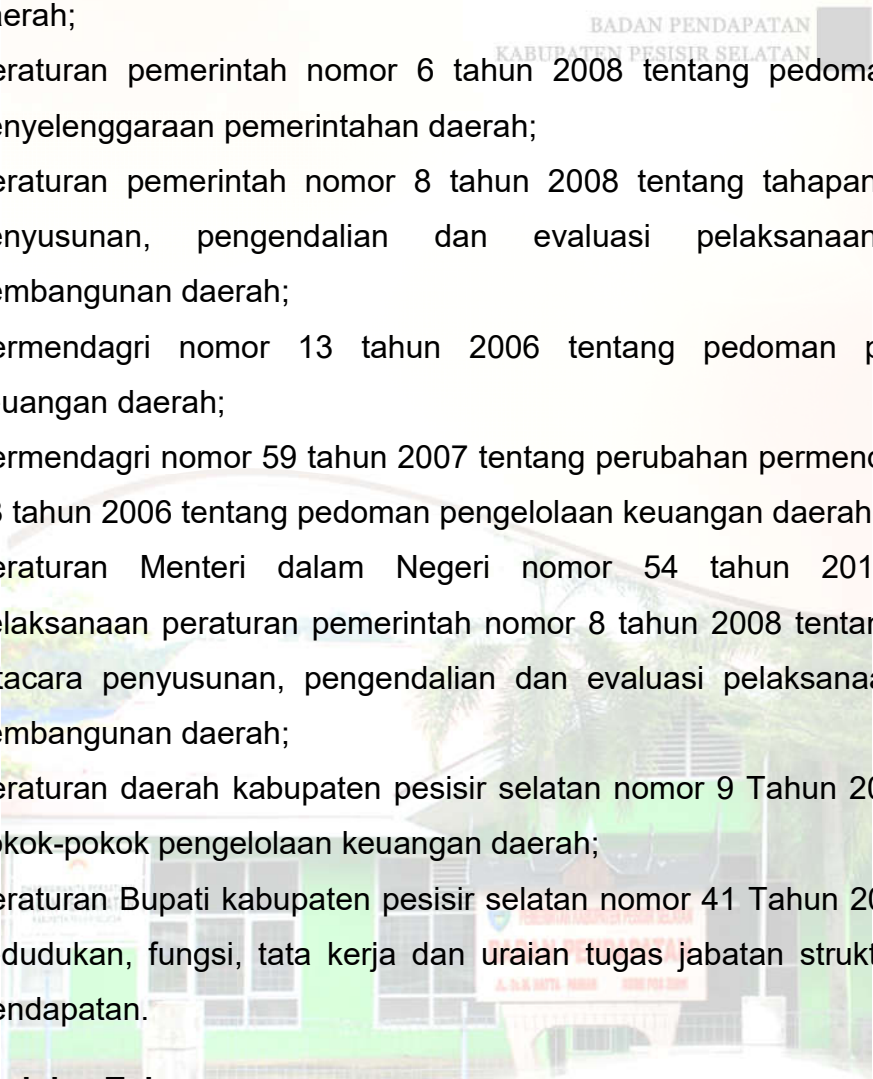
Sejalan dengan Misi ke-satu Bupati Pesisir Selatan melaksanakan reformasi birokrasi dengan Aparatur yang bersih dan Responsif dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu ***“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Tertib Administrasi dan Pelayanan Prima serta didukung oleh Peran Aktif Masyarakat”*** yang diharapkan dapat mendukung terlaksananya sasaran dan kebijakan strategis pembangunan ditahun 2017 yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk dapat mewujudkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja tersebut, Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan menyusun Rencana Kerja Tahun 2017. Selanjutnya, Renja OPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan kabupaten pesisir selatan;
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah;
4. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah;

- 
5. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaen/kota;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan negara/daerah;
 7. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah;
 8. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 9. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 10. Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 11. Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 12. Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 13. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 9 Tahun 2008 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
 14. Peraturan Bupati kabupaten pesisir selatan nomor 41 Tahun 2016 tentang kedudukan, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Badan Pendapatan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2017 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah bidang Pendapatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2017.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Sebagai acuan bagi badan pendapatan kabupaten pesisir selatan dalam mengoperasikan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan badan pendapatan kabupaten pesisir selatan tahun 2017.

BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja OPD 2017

BAB III : Rencana Kerja Tahun 2017 yang mencakup

- Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan.
- Indikator Kinerja, kelompok sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra OPD.
- Dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju tahun 2018 berdasarkan pagu indikatif.
- Sumber dana/pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjalankan program/kegiatan.

BAB IV : Penutup



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017

Pada tahun anggaran 2017 Renja Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sudah terbentuk dengan total anggaran Rp.3.332.737.619,-

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan

a. Tugas dan Fungsi (Tupoksi)

- 1) Badan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otomomi dibidang Pendapatan.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat 1, Badan Pendapatan mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan.
 - Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendapatan.
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - Pelaksanaan administrasi Badan Pendapatan.
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan PBB Perkotaan/Perdesaan.
 - Pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan PBB Perkotaan/Perdesaan.
 - Pembinaan unit pelaksana teknis dinas.
 - Pengguna anggaran dinas.
 - Penggunaan badan dinas.
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
 - Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

b. Sumber Daya Manusia Aparatur

- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan.

- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.
- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

c. Sarana dan Prasarana

- Mengembangkan informasi teknologi serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan perencanaan yang lebih baik dalam menunjang pembangunan bidang pendapatan.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan badan pendapatan sehingga masyarakat dengan mudah mendapatkan akses pelayanan yang nyaman, bermutu dan berkualitas.
- Penataan ruangan kerja untuk memenuhi standar pelayanan yang layak.

2.3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2017 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.



BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2017

3.1 Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target ini merupakan ukuran kinerja dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada indikator kinerja mengarah kepada suatu titik terang pencapaian hasil. Dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi di masa mendatang. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran lebih nyata dari perumusan Visi dan Misi yang lebih idealistik.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah di atas, yaitu:

1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatkan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah baru dengan memberikan pelayanan pajak maksimal .
3. Mewujudkan tim kerja dengan Instansi terkait yang memiliki etos kerja dan profesional dengan melakukan monitoring, rekonsiliasi terhadap pelaporan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam waktu tahunan/periodik yang dinyatakan secara kuantitatif, sehingga dapat diukur. Sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Pendapatan antara lain:

1. Terwujudnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Terwujudnya pembinaan, penertiban pajak, dan retribusi melalui penggalian potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Terwujudnya peningkatan pengendalian monitoring, pelaporan, dan rekonsiliasi dengan instansi terkait.

Program dan Kegiatan

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor.
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
11. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan SKPD

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
3. Pengadaan Meubiler
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.

C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

D. Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD

E. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
2. Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah
3. Penyusunan laporan PAD
4. Cetak massal dan pengadaan bahan-bahan dokumen PBB-P2

5. Pengadaan barang kuasi
6. Monitoring dan Evaluasi PBB-P2
7. Pendataan dan verifikasi nomor objek pajak PBB-P2
8. Penunjang Sistem e-PAD
9. Monitoring dan evaluasi PAD
10. Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah
11. Pemutakhiran Data Piutang PBB-P2
12. Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah
13. Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Umum
14. Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Usaha
15. Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu
16. Revisi Peraturan Daerah tentang Pajak BPHTB
17. Sosialisasi Pajak Daerah
18. Pemetaan Potensi Reklame

3.2 MISI KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARAKAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD

Misi adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Misi keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Misi Badan Pendapatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah misi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

3.3 DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN MAJU TAHUN 2019 BERDASARKAN PAGU INDIKATIF.

Adapun rumusan rencana program dan kegiatan OPD Tahun 2017 dan perkiraan maju tahun 2018 Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sesuai tabel berikut :

BAB IV P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dokumen perencanaan yang penting untuk dipedomani yang memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017 dilingkup Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan 2017.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan yang diemban oleh Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu OPD dilingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait sebagai pelaksanaan isi rencana kerja badan pendapatan.

Semoga rencana kerja badan pendapatan tahun 2017 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku terkait, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak.

Painan, 30 November 2016
**Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Pesisir Selatan**

DASRIANTO PUTRA, S.Sos, Msi
NIP. 19731230 199403 1 003

TABEL
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5	6	7	9	10
URUSAN : OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				622.065.038,00			805.821.541,80
	1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terlaksananya pembayaran rekening telpon, listrik dan air	BAPEN	12 Bulan	80.205.408,00	APBD	12 Bulan	88.225.949
	2 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terlaksananya administrasi keuangan OPD	BAPEN	100%	71.627.018,00	APBD	100%	78.789.720
	3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terlaksananya kebersihan kantor	BAPEN	12 Bulan	25.041.500,00	APBD	12 Bulan	27.545.650
	4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	BAPEN	12 Bulan	41.802.448,00	APBD	12 Bulan	45.982.693
	5 Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	BAPEN	12 Bulan	24.985.720,00	APBD	12 Bulan	27.484.292
	6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BAPEN	12 Bulan	13.885.000,00	APBD	12 Bulan	15.273.500
	7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BAPEN	12 Bulan	9.100.000,00	APBD	12 Bulan	10.010.000
	8 Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	BAPEN	12 Bulan	65.995.000,00	APBD	12 Bulan	72.594.500
	9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BAPEN	12 Bulan	164.200.000,00	APBD	12 Bulan	180.620.000
	10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	BAPEN	12 Bulan	96.100.000,00	APBD	12 Bulan	105.710.000
	11 Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Terlaksananya operasional perencanaan dan pelaporan	BAPEN	KUA PPAS, RKA, DPA, LAKIP, TAPKIN	29.122.944,00	APBD	KUA PPAS, RKA, DPA, LAKIP, TAPKIN	32.035.238
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				733.763.855,00			807.140.240,50
	1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	BAPEN	12 Bulan	66.492.100,00	APBD	12 Bulan	73.141.310
	2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	BAPEN	12 Bulan	345.197.255,00	APBD	12 Bulan	379.716.981
	3 Pengadaan Meubiller	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BAPEN	meja, kursi eselon, kursi rapat, meja rapat	78.767.000,00	APBD	meja, kursi eselon, kursi rapat, meja rapat	86.643.700

No	Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	4 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BAPEN	12 Bulan	143.750.000,00	APBD	12 Bulan	158.125.000
	5 Pemeliharaan rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BAPEN	12 Bulan	99.557.500,00	APBD	12 Bulan	109.513.250
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				49.650.000,00			54.615.000,00
	1 Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	BAPEN	12 Bulan	49.650.000,00	APBD	12 Bulan	54.615.000
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				28.467.278,00			31.314.005,80
	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BAPEN	Neraca, LRA, CaLK	28.467.278,00	APBD	Neraca, LRA, CaLK	31.314.005,80
V	Program Peningk. dan Pengemb.Pengelolaan Keuangan Daerah				1.898.791.448,00			1.979.990.716,00
	1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	BAPEN	100%	124.662.730,00	APBD	100%	137.129.003,00
	2 Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah	BAPEN	5 Kali	55.720.408,00	APBD	5 Kali	61.292.448,80
	3 Penyusunan laporan PAD	Terlaksananya Penyusunan laporan PAD	BAPEN	Buku laporan	73.140.000,00	APBD	Buku laporan	80.454.000,00
	4 Cetak Massal dan pengadaan bahan-bahan Dokumen PBB-P2	Tersedianya Dokumen Pendukung PBB-P2	BAPEN	SPPT, DHKP, STTS, TTS	339.380.000,00	APBD	SPPT, DHKP, STTS, TTS	373.318.000,00
	5 Pengadaan barang kuasi	Terlaksananya Pengadaan barang kuasi	BAPEN	1 Paket	80.000.000,00	APBD	1 Paket	88.000.000,00
	6 Monitoring dan Evaluasi PBB-P2	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi PBB-P2	BAPEN	12 Bulan	84.584.728,00	APBD	12 Bulan	93.043.200,80
	7 Pendataan dan verifikasi nomor objek pajak PBB-P2	Terlaksananya Pendataan dan verifikasi nomor objek pajak PBB-P2	BAPEN	100%	119.122.224,00	APBD	100%	131.034.446,40
	8 Penunjang Sistem E -PAD	Terlaksananya operasional sistem E -PAD	BAPEN	12 Bulan	92.017.852,00	APBD	12 Bulan	101.219.637,20
	9 Monitoring dan Evaluasi PAD	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap PAD	BAPEN	12 Bulan	88.367.208,00	APBD	12 Bulan	97.203.928,80
	10 Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah	Terlaksananya Pelayanan peningkatan pemungutan pajak daerah	BAPEN	12 Bulan	108.867.026,00	APBD	12 Bulan	119.753.728,60
	11 Pemuthakiran Data Piutang PBB-P2	Terlaksananya Pemuthakiran Data Piutang PBB-P2	BAPEN	2 kecamatan	105.676.820,00	APBD	2 kecamatan	116.244.502,00
	12 Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Optimalisasi Penerimaan Daerah	BAPEN	12 Bulan	64.596.764,00	APBD	12 Bulan	71.056.440,40

No	Urusan Bidang/Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2018	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	13 Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Umum	Terlaksananya Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Umum	BAPEN	1 buah Ranperda	86.765.000,00	APBD	1 buah Ranperda	95.441.500,00
	14 Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Usaha	Terlaksananya Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Jasa Usaha	BAPEN	1 buah Ranperda	79.565.000,00	APBD	1 buah Ranperda	87.521.500,00
	15 Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perizinan Tertentu	Terlaksananya Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah Retribusi Perizinan	BAPEN	1 buah Ranperda	81.365.000,00	APBD	1 buah Ranperda	89.501.500,00
	16 Revisi Peraturan Daerah tentang Pajak BPHTB	Terlaksananya Revisi mengenai Peraturan Daerah Pajak BPHTB	BAPEN	1 buah Perda	47.611.000,00	APBD	1 buah Perda	52.372.100,00
	17 Sosialisasi Pajak Daerah	Terlaksananya Sosialisasi mengenai Pajak Daerah	BAPEN	4 kali	168.549.800,00	APBD	4 kali	185.404.780,00
	18 Pemetaan Potensi Reklame	Terlaksananya Pemetaan Lokasi mengenai Potensi Reklame	BAPEN	100%	98.799.888,00	APBD	100%	108.679.876,80
	TOTAL				3.332.737.619,00	-	-	3.678.881.504,10

Painan, Januari 2017
**Kepala Badan Pendapatan
Kabupaten Pesisir Selatan**

DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19731230 199403 1 003